Indonesian Society and Religion Research
E-ISSN: 3046-9678
Volume 3 Nomor 3 Nopember 2026
https://ccg-edu.org/index.php/isah

Pancasila dalam Praktik Konseling: Strategi Penguatan Civic Disposition di Lingkungan Sekolah

Verbena Ayuningsih Purbasari[1], R. Samidi[2], Muhammad Arif Budiman Sucipto[3], Bekti Galih Kurniawan[4]

[1]Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari, Indonesia

[2,3]Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia

[4]Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Corresponding authors email: verbenaayuningsihpurbasari@uinponorogo.ac.id

Abstract: *Strengthening students' civic disposition has largely relied on Civics and Pancasila Education, so the internalization of Pancasila values often remains normative and cognitive. This study aims to formulate (1) the nature of Pancasila value-based counseling and the dimensions of the five principles in school counseling processes, (2) Pancasila value-based counseling as a strategy for strengthening students' civic disposition, and (3) the challenges of its implementation. The study used a qualitative approach with a Systematic Literature Review (SLR) following PRISMA 2020. Articles were retrieved through Publish or Perish from Google Scholar, and screening yielded 18 articles that were synthesized descriptively and thematically. The findings show that Pancasila value-based counseling is professional assistance that helps students understand their experiences, consider the consequences of their actions, and make accountable decisions. Pancasila serves a dual role as both the goal of the service and the counselor's guide in building relationships. The five principles appear in counseling as a framework for moral reflection (first principle), empathy and rejection of violence (second), tolerance and acceptance of differences (third), and deliberation and fairness in collaborative group counseling (fourth and fifth). Counseling can strengthen civic disposition when it starts from students' real experiences, is followed by opportunities to practice through projects and school routines, and is assessed through specific behaviors and student reflection. Implementation challenges include teachers' limited ability to translate values into action, cultural diversity and unequal access, weak continuity among counseling, classroom, and family, and the difficulty of ensuring that behavioral change lasts. Development therefore requires continuous teacher professional development through the application stage, diversity-sensitive services, teacher–parent coordination, and repeated behavioral observation.*

Keywords: *Pancasila value-based counseling, civic disposition, guidance and counseling, systematic literature review*

Abstrak: Penguatan civic disposition peserta didik umumnya bertumpu pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila, sehingga internalisasi nilai Pancasila sering berhenti pada ranah normatif dan kognitif. Penelitian ini bertujuan merumuskan (1) hakikat konseling berbasis nilai Pancasila dan dimensi kelima sila dalam proses konseling di sekolah, (2) konseling berbasis nilai Pancasila sebagai cara menguatkan civic disposition peserta didik, dan (3) tantangan implementasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan Systematic Literature Review (SLR) yang mengacu pada PRISMA 2020. Artikel dihimpun melalui Publish or Perish dari Google Scholar dan, setelah penyaringan, diperoleh 18 artikel yang disintesis secara deskriptif-tematik. Hasil menunjukkan bahwa konseling berbasis nilai Pancasila merupakan bantuan profesional yang membantu peserta didik memahami pengalamannya, memikirkan dampak tindakannya, dan memilih keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pancasila berperan ganda sebagai tujuan layanan dan pedoman konselor dalam membangun relasi. Kelima sila tampak dalam proses konseling sebagai kerangka refleksi moral (sila pertama), empati dan penolakan kekerasan (sila kedua), toleransi dan penerimaan perbedaan (sila ketiga), serta musyawarah dan keadilan dalam konseling kelompok yang kolaboratif (sila keempat dan kelima). Konseling dapat memperkuat civic disposition apabila bertolak dari pengalaman nyata peserta didik, diikuti kesempatan praktik melalui proyek dan pembiasaan sekolah, serta dinilai melalui perilaku spesifik dan refleksi peserta didik. Tantangan implementasi meliputi keterbatasan kemampuan guru menerjemahkan nilai menjadi tindakan, keberagaman budaya dan kesenjangan akses, lemahnya kesinambungan antara konseling, kelas, dan keluarga, serta sulitnya memastikan perubahan perilaku bertahan. Pengembangannya memerlukan pengembangan profesional guru yang berlanjut hingga tahap penerapan, layanan yang peka terhadap keberagaman, koordinasi guru dan orang tua, serta pengamatan perilaku secara berulang.

Kata kunci: konseling berbasis nilai Pancasila, civic dispositions, bimbingan dan konseling, systematic literature review

PENDAHULUAN

Pendidikan nasional pada hakikatnya tidak hanya bertujuan mengembangkan kemampuan intelektual peserta didik, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian warga negara yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) peserta didik agar memiliki sikap religius, humanis, demokratis, serta bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia (Damri & Putra, 2020; Octavia & Sumanto, 2018). Namun, dinamika sosial dan perkembangan globalisasi saat ini menghadirkan tantangan serius berupa degradasi nilai moral, melemahnya nasionalisme, serta menurunnya kepedulian sosial di kalangan peserta didik.

Perkembangan era digital dan masyarakat multikultural menuntut peserta didik untuk memiliki *civic disposition* yang kuat dan adaptif. Banks & Banks (2020) menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan multikultural memerlukan integrasi nilai, sikap, dan perilaku yang menghargai keberagaman serta keadilan sosial. Dalam konteks Indonesia yang berlandaskan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan tidak dapat dilepaskan dari internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi, pandangan hidup, dan dasar negara. Pancasila memegang peranan penting sebagai dasar nilai penyelenggaraan pendidikan sekaligus membentuk *civic disposition* peserta didik. Pancasila perlu hadir dalam pengalaman keseharian peserta didik, termasuk saat mereka dihadapkan pada konflik, kondisi yang mengharuskan untuk menentukan pilihan, dan mengadakan hubungan sosial dengan orang lain. Namun, implementasinya di sekolah sering kali masih bersifat normatif dan kognitif, belum menyentuh aspek afektif dan perilaku peserta didik secara mendalam.

Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam membentuk *civic disposition* peserta didik, tetapi keterbatasan waktu pembelajaran dan pendekatan instruksional sering menyebabkan nilai-nilai Pancasila belum terinternalisasi secara optimal dalam diri peserta didik (Cahyani & Dewi, 2021; Octavia & Sumanto, 2018). Kondisi ini diperparah dengan munculnya berbagai permasalahan peserta didik seperti rendahnya disiplin, kurangnya empati sosial, perilaku intoleran, serta lemahnya tanggung jawab sebagai warga sekolah dan warga negara. Umamah & Nurchotimah (2023) menempatkan bimbingan dan konseling sebagai salah satu ruang pendidikan yang relevan untuk mendukung pembangunan karakter melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks tersebut, layanan Bimbingan dan Konseling (BK) memiliki posisi strategis sebagai wahana penguatan *civic disposition* peserta didik. Corey (2013) menegaskan bahwa konseling tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah individu, tetapi juga membantu individu mengembangkan nilai, sikap, dan perilaku positif dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai

Pancasila dalam layanan bimbingan dan konseling menjadi sangat relevan sebagai upaya membentuk *civic disposition* peserta didik secara komprehensif.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila melalui layanan bimbingan dan konseling mampu meningkatkan kesadaran moral, sikap kebangsaan, dan perilaku prososial peserta didik ((Nasution dkk., 2024; Riswanto, 2019). (Muttaqin dkk., 2025) menegaskan juga bahwa Pancasila dapat dijadikan landasan filosofis, etis, dan operasional dalam pelaksanaan layanan konseling untuk pembentukan *civic disposition* peserta didik. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial dapat diinternalisasikan melalui pendekatan konseling yang humanistik, dialogis, dan kontekstual.

Penguatan *civic disposition* peserta didik menjadi semakin mendesak karena tanggung jawabnya selama ini bertumpu pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan peran dari para gurunya (Setiawan dkk., 2024). Internalisasi Pancasila kerap terkendala pada ranah normatif dan kognitif oleh sebab terbatasnya waktu dan pola instruksionalnya. Aspek afektif dan perilaku peserta didik dalam cara mereka mereka menghadapi konflik, pilihan, dan relasi sosial belum dikaji secara mendalam. Layanan bimbingan dan konseling menawarkan ruang yang lebih personal dan dialogis untuk menjawab kebutuhan ini. Pengembangan *civic disposition* peserta didik merupakan bagian dari tugas dan fungsi layanan bimbingan dan konseling, dan konselor dapat menyusun program serta asesmen capaian karakter peserta didik (Cahyono, 2022). Beragamnya persoalan personal yang dihadapi oleh peserta didik tentunya menuntut konselor memiliki kompetensi dan rasa keadilan sosial (Ratts dkk., 2016). Dalam konteks Indonesia, kompetensi tersebut perlu berpijak pada Pancasila sebagai landasan nilai.

Penelitian mengenai *civic disposition* saat ini masih didominasi pada fokusnya yang terbatas pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) (Irwan, 2021), serta strategi pengembangan budaya sekolah (Zalmi & Montessori, 2022). Belum banyak yang secara khusus membahas pengembangan *civic disposition* melalui layanan bimbingan dan konseling, meskipun di sisi lain sudah terdapat kajian yang mencoba menghubungkan layanan tersebut dengan Profil Pelajar Pancasila (Cahyono, 2022). Terdapat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila melalui bimbingan dan konseling dapat meningkatkan kesadaran moral, sikap kebangsaan, dan perilaku pro-sosial (Nasution dkk., 2024; Riswanto, 2019). Akan tetapi, sejauh penelusuran yang dilakukan belum tampak penelitian yang menjadikan *civic disposition* sebagai konstruk utama dan menurunkannya menjadi strategi layanan konseling yang operasional. Persoalan lainnya ialah pengukuran, penilaian *civic disposition* dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) masih membutuhkan instrumen yang dikembangkan khusus berdasarkan konstruk teoretisnya (Oktaviyasari & Handoyo, 2026), sehingga efektivitas penguatannya melalui konseling pun belum didukung perangkat asesmen yang memadai.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada upayanya memposisikan Pancasila sebagai landasan filosofis, etis, dan operasional praktik konseling dengan *civic disposition* sebagai konstruk utama sasaran. Penelitian ini merumuskan: (1) hakikat konseling berbasis nilai Pancasila dalam pendidikan dan dimensi nilai kelima sila dalam proses konseling di sekolah, (2) konseling berbasis nilai Pancasila sebagai cara menguatkan *civic disposition* peserta didik, dan (3) tantangan implementasi pengembangannya. Pendekatan konseling yang humanistik, dialogis, dan kontekstual diintegrasikan dengan nilai-nilai kelima sila dan diarahkan pada situasi nyata peserta didik di lingkungan sekolah, seperti konflik, pengambilan keputusan, dan relasi sosial. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai fokus utama, penelitian ini menawarkan strategi berbasis praktik konseling berlandaskan Pancasila untuk menguatkan dimensi afektif dan perilaku *civic disposition* peserta didik.

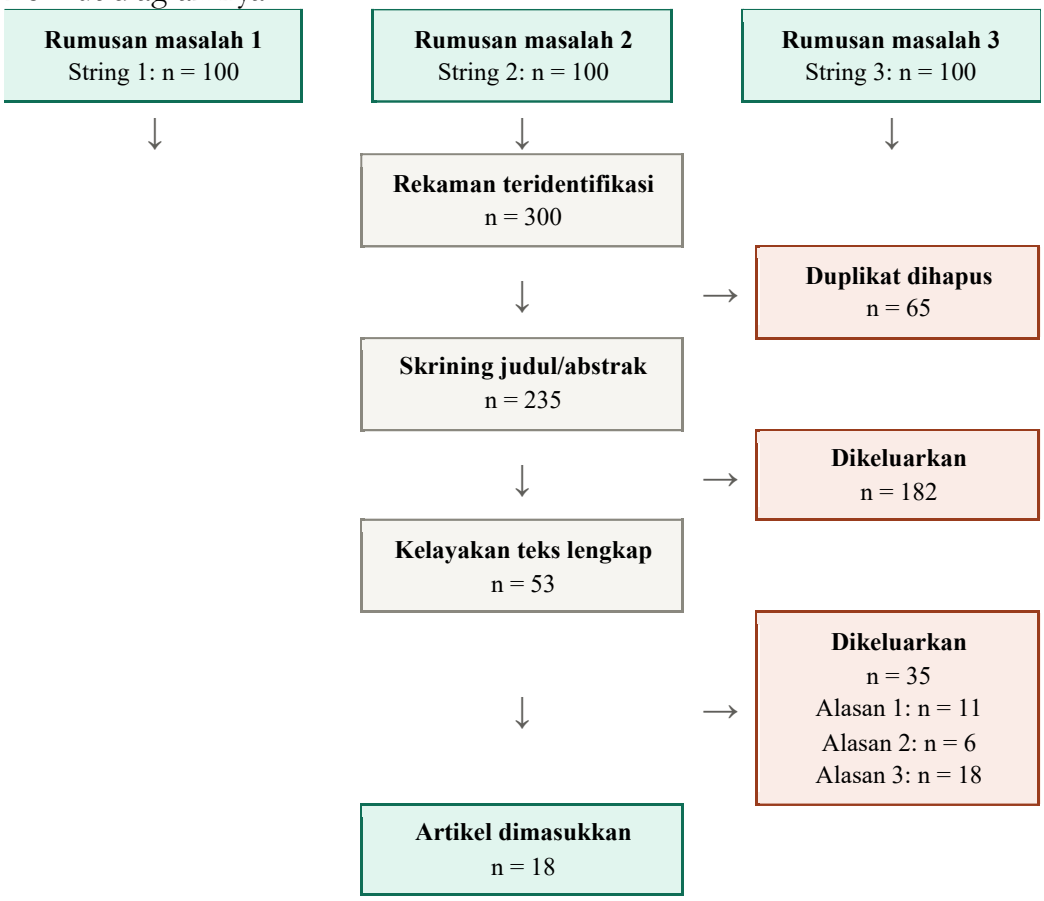
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR). SLR adalah metode yang mengidentifikasi, menyeleksi, menilai, dan mensintesis hasil penelitian yang relevan secara sistematis, eksplisit, dan dapat direplikasi (Xiao & Watson, 2019). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk merumuskan strategi penguatan *civic disposition* melalui konseling berbasis nilai Pancasila berdasarkan bukti yang dikumpulkan secara terstruktur, sekaligus memetakan kesenjangan penelitian yang ada (Snyder, 2019). Pendekatan kualitatif dipilih karena sintesis dilakukan terhadap makna konsep, argumen, dan temuan dari studi dengan desain beragam, bukan terhadap data numerik yang dapat digabungkan secara statistik (Creswell & Poth, 2018). Pelaksanaan SLR mengacu pada panduan PRISMA 2020 (Page dkk., 2021), di mana tinjauan penelitian ini dipandu oleh tiga rumusan masalah, yaitu (1) hakikat konseling berbasis nilai Pancasila dalam pendidikan dan dimensi nilai kelima sila dalam proses konseling di sekolah, (2) konseling berbasis nilai Pancasila sebagai cara menguatkan *civic disposition* peserta didik, dan (3) tantangan implementasi pengembangannya.

Korpus yang dianalis terdiri atas artikel jurnal yang diperoleh dengan penelusuran sistematis menggunakan aplikasi Publish or Perish melalui Google Scholar yang terbit antara bulan Januari 2024 hingga Desember 2025, dengan string pencarian yang disusun berdasarkan ketiga rumusan masalah dan ditetapkan sebelum penyaringan, seperti: konseling "nilai-nilai Pancasila" sekolah, “civic disposition” “bimbingan dan konseling” OR konseling, tantangan OR kendala konseling “nilai Pancasila” sekolah. Setiap string diperiksa pada 100 hasil teratas berdasarkan relevansi. Kriteria inklusi ditetapkan sebelum penyaringan, yaitu artikel berbahasa Indonesia, tersedia teks lengkap, dan membahas konseling atau bimbingan dan konseling berbasis nilai Pancasia, *civic disposition* atau karakter kewarganegaraan dalam konteks sekolah, atau tantangan penerapannya. Kriteria eksklusi meliputi artikel opini, kajian literatur,

buku, skripsi dan tesis, laporan organisasi, serta artikel yang tidak sesuai dengan fokus penelitian.

Hasil penelusuran disaring bertahap melalui judul, abstrak, dan teks lengkap setelah duplikasi dihapus, dan alurnya dilaporkan dalam diagram alur PRISMA: sumber ditemukan, tersisa setelah duplikasi dihapus, setelah penyaringan judul dan abstrak, dinilai pada tahap teks lengkap, dan dianalisis. Berikut diagramnya:



Gambar 1. Diagram alir PRISMA proses seleksi artikel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil identifikasi terhadap 18 artikel, disusun berdasarkan rincian jurnal, nama penulis, judul, dan pertanyaan penelitian. Hasil identifikasi secara rinci disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Temuan 18 Artikel dari database Google Scholar

No	Penulis	Judul	RM
1	R. Frasyaigu, D. Ramadhani, M. T. Hidayat, dkk. (2024)	Desain Layanan Bimbingan Konseling dalam Membudayakan Nilai Profil Pelajar Pancasila Siswa Sekolah Dasar	1, 3
2	D. P. Abadi, N. Hidayah, dan F. Wahyuni (2024)	Pendekatan Multikultural dalam Layanan Bimbingan Konseling guna Penguatan	1, 3

No	Penulis	Judul	RM
		Profil Pelajar Pancasila Dimensi Berkebhinekaan Global	
3	N. Asyah, R. F. Putri, dan R. F. Putri (2024)	Pendampingan Pelaksanaan Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) melalui Layanan Bimbingan dan Konseling di SAS English Laboratory	1, 3
4	M. Ramli, N. Hidayah, D. H. Rahman, dkk. (2024)	Pelatihan Penerapan Layanan Konseling Online Berfokus Solusi Bermuatan Nilai Pancasila pada Guru BK	1, 3
5	P. H. Kunaefi, A. Nursaleh, dan A. N. Hidayat (2024)	Program Bimbingan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila dalam Meningkatkan Karakter Prososial di SDN Simpang 1 Kabupaten Cianjur	1
6	T. Suhartoni, S. J. Nafisah, dkk. (2025)	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mencegah Aksi Kenakalan Remaja	1
7	D. Qondias, M. D. Noge, M. L. Lodo, dan V. Meo (2025)	Penguatan Nilai-Nilai Multikultural melalui Pembelajaran Pancasila Berbasis Media Interaktif di Sekolah Dasar: Learning Session on Promoting Multicultural Values through the Teaching of Pancasila Education Using Interactive Media in Elementary Schools	1, 3
8	N. Ritonga dan S. Saleh (2024)	Penerapan *Hidden Curriculum* untuk Meningkatkan Nilai-Nilai Toleransi dan Kerjasama pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewaraganegaraan di Sekolah Menengah Pertama	1
9	D. Riani (2025)	Pelayanan Profesional Guru Bimbingan Konseling dalam Meminimalisir Kesalahpahaman tentang Bimbingan Konseling di Sekolah	1
10	A. Ardiana, K. U. Syaimi, N. Nurlaili, dkk. (2025)	Peningkatan Empati dan Perilaku Prososial Siswa melalui Layanan Bimbingan Kelompok Berbasis Nilai Nilai Pancasila di Kelas APL SMK N 3 Medan	1
11	F. Rozzaqyah, Y. Yosef, R. M. Putri, S. Ar, dkk. (2024)	Impementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada Layanan Bimbingan dan Konseling bagi Guru BK di Prabumulih	1
12	M. Halawati, D. Pusparini, dkk. (2025)	Implementasi Pembelajaran Nilai-Nilai Pancasila terhadap Pembentukan Karakter Religius Anak Usia 5–6 Tahun	1

No	Penulis	Judul	RM
13	T. F. W. Banggo, S. Supeni, dan A. Trisiana (2025)	Upaya Penanggulangan Kekerasan dalam Menerapkan *Civic Dispositions* melalui Satuan Tugas Penanggulangan Kesiswaan pada Siswa SMA Negeri Colomadu Tahun 2025	2
14	S. Mazid, A. Wulansari, dan I. Hasanah (2025)	Integrating Civic Spirituality and Civic Disposition to Build Ethical Citizen Character	2
15	I. Iqbal dan S. Syafriadi (2025)	Integrasi Profil Pelajar Pancasila dalam Pembelajaran PPKn untuk Meningkatkan Sikap Moral Siswa	2, 3
16	F. D. Triaswari dan A. P. Asmaroini (2024)	Implementasi *Civic Disposition* Peserta Didik di Kurikulum Merdeka	2
17	N. K. Maheswari dan A. Fatayan (2025)	Implementasi *Civic Dispotition* Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dalam Meningkatkan Kecintaan Tanah Air pada Peserta Didik Kelas 2 di Sekolah Dasar	2, 3
18	W. C. Harefa, F. Lase, A. Harefa, dan S. K. Hulu (2025)	Implementasi Karakter Bertanggungjawab Siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila	3

Setiap artikel dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian, kemudian hasilnya dijelaskan secara deskriptif sebagai berikut.

Hakikat Konseling berbasis Nilai Pancasila dan Dimensi Kelima Sila dalam Proses Konseling di Sekolah

Konseling berbasis nilai Pancasila dapat dipahami sebagai bantuan profesional yang dapat membantu peserta didik dalam memahami pengalamannya, memikirkan dampak yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan, dan mengambil pilihan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, Pancasila memiliki peran ganda yaitu menjadi tujuan layanan sekaligus sebagai pedoman bagi konselor dalam membangun komunikasi dan hubungan dengan peserta didik. Contohnya, tujuan untuk menimbulkan rasa empati dapat dimunculkan ketika peserta didik mencoba belajar memahami perasaan temannya yang sedang terluka. Pada saat yang sama, konselor dapat menunjukkan empati dengan cara mendengarkan cerita peserta didik sebelum memberi tanggapan atas cerita yang disampaikan. Peserta didik tidak hanya diajari sebuah nilai, ia dapat merasakannya secara langsung lewat perlakuan yang ia terima selama melakukan sesi konseling, lalu mencobanya sendiri dalam hubungan sosialnya dengan orang lain (Ardiana dkk., 2025; Kunaefi dkk., 2024; Putri Abadi dkk., 2024).

Dalam sisi perencanaan, Frasyaigu dkk., (2024) menemukan bahwa pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan dapat membantu para guru merancang layanan bimbingan dan konseling yang memuat nilai-nilai Pancasila.

(Asyah dkk., 2024) menambahkan, pemahaman guru meningkat setelah mengikuti diskusi dan simulasi penerapan nilai Pancasila. Di Prabumulih, pendampingan oleh Rozzaqyah dkk., (2024) membuat guru bimbingan dan konseling mampu menyusun modul Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan nilai membutuhkan keputusan yang konkret sejak tahap awal atau perencanaan. Guru perlu menentukan pengalaman peserta didik seperti apa yang akan dicapai, pertimbangan nilai apa yang akan muncul, dan tindak lanjut apa yang dapat memberi peserta didik kesempatan untuk mencoba pilihannya.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama hadir sebagai fondasi sikap religius dan kesadaran moral. Pada anak usia dini, nilai ketuhanan dibentuk melalui pembelajaran nilai (Halawati dkk., 2025), sedangkan pada jenjang berikutnya nilai tersebut dibahas bersama dimensi spiritual kewargaan yang mendukung karakter etis warga negara (Mazid dkk., 2025). Dalam konseling, nilai ini bekerja sebagai kerangka refleksi. Peserta didik diajak menimbang tindakan berdasarkan norma agama dan etika universal, bukan hanya kepentingan pribadi.

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dimensi ini paling dekat dengan masalah yang dihadapi oleh sekolah. Nilai kemanusiaan dapat dimunculkan melalui kegiatan bimbingan kelompok yang dapat meningkatkan rasa empati peserta didik, perilaku pro-sosial k(Kunaefi dkk., 2024) menghargai martabat manusia, dan upaya penolakan terhadap terjadinya kekerasan (Ardiana dkk., 2025).

Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai ini menekankan kemampuan peserta didik untuk dapat menyesuaikan diri menjadi bagian dari komunitas sekolah di tengah perbedaan identitas dan pengalaman. Putri Abadi dkk., (2024) menyatakan bahwa pendekatan multikultural dalam bimbingan dan konseling dapat membuka kesempatan untuk mengembangkan toleransi dan pemahaman terhadap latar sosial budaya teman yang berbeda-beda. Pandangan ini diperkuat oleh Qondias dkk. (2025) tentang pembelajaran multikultural dengan media interaktif, serta Ritonga & Saleh (2024) tentang toleransi dan kerja sama melalui *hidden curriculum*. Peserta didik belajar arti persatuan melalui interaksi yang dilakukan secara berulang, termasuk di dalamnya mereka belajar mengenai rasa diterima dan diabaikan dalam kelompok. Dalam layanan kelompok, konselor bisa memakai pengalaman seperti itu untuk membantu peserta didik mengenali adanya "prasangka" dan mencari cara untuk menarik dan melibatkan teman yang selama ini merasa tersisih atau terabaikan.

Sila keempat dan kelima, Kerakyatan dan Keadilan Sosial. Kedua sila ini bisa dilihat melalui dua pertanyaan mendasar yang sering dijumpai dalam kehidupan berkelompok: siapa saja yang dilibatkan ketika membuat keputusan, dan bagaimana setiap anggota kelompok merasakan dampak tersebut? Dalam konseling kelompok, nilai musyawarah dapat diwujudkan dengan berfokus pada upaya pencarian solusi yang bersifat kolaboratif (Asyah dkk., 2024; Ramli dkk., 2024; Rozzaqyah dkk., 2024), seperti memberi waktu bagi anggota yang jarang berbicara, meminta peserta menanggapi dengan alasan yang berbeda, dan

memeriksa apakah setiap pandangan individu benar-benar dipertimbangkan. Nilai keadilan sosial dapat diamati ketika peserta didik menilai pembagian tugas, kesempatan, atau beban setelah kesepakatan dibuat. Keputusan yang telah disepakati bersama masih memungkinkan untuk dapat ditinjau ulang jika tidak ada unsur keadilan sosial.

Konseling berbasis Nilai Pancasila sebagai Cara Memperkuat Civic Disposition Peserta Didik

Civic disposition, atau watak kewarganegaraan, dapat dipahami sebagai kecenderungan peserta didik dalam menggunakan pertimbangan moral saat mengadakan hubungan sosial dengan orang lain. Mazid dkk. (2025) mengaitkannya dengan *civic spirituality*, di mana peserta didik mengutamakan karakter tanggung jawab, partisipasi, dan kepedulian pada kepentingan bersama. Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, karakter peserta didik untuk selalu menjunjung kejujuran akademik, kolaborasi, dan toleransi dapat diasah melalui perpaduan antara materi, proyek/tugas, dan pembiasaan yang terjadi di sekolah (Iqbal & Syafriadi, 2025). Bagi praktik konseling, temuan ini berkolerasi pada kemampuan peserta didik dalam membuat alasan berdasarkan respon dan tindakan yang ia pilih saat kepentingan pribadinya berbenturan dengan kepentingan orang lain.

Berangkat dari pengalaman nyata peserta didik. Konseling berbasis nilai Pancasila berawal dari adanya kebutuhan terhadap berbagai masalah personal yang dialami peserta didik di sekolah, seperti kekerasan verbal yang kerap terjadi antar peserta didik (Banggo dkk., 2025). Dalam konseling, kekerasan verbal dapat dibahas dari sudut pandang peserta didik yang menjadi korban, pelaku, maupun saksi. Misalnya, saat berposisi sebagai saksi, di satu sisi peserta didik menyadari bahwa temannya dapat tersakiti oleh perkataannya, tetapi di sisi lain ia juga merasa akan berisiko jika menunjukkan kekhawatiran dan hal tersebut justru akan dinilai melawan kelompoknya. Konselor bisa membantunya mengenali kekhawatiran itu dan memilih tindakan yang aman serta mungkin ia lakukan, yaitu dengan berhenti ikut menertawakan, menemani teman yang mendapat kekerasan verbal, atau mencari bantuan. Di titik inilah empati muncul, menjadi bagian dari *civic disposition*, karena ia memengaruhi kesediaan seseorang bertanggung jawab atas tindakannya dalam kelompok.

Butuh kesempatan untuk mempraktikkan. Keputusan yang sudah dipikirkan dan didiskusikan dalam layanan konseling perlu dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Triaswari dkk. (2024) menemukan fakta bahwa untuk menguatkan *civic disposition* di sekolah, perlu adanya proyek yang memfasilitasi ruang bagi tumbuhnya nilai-nilai Pancasila. Yang tidak kalah penting juga adanya komitmen antarguru, pemantauan, dan evaluasi untuk mengawal proses tersebut. Selain itu, penguatan *civic disposition* juga dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan (seperti seni), pembiasaan sekolah, dan kegiatan kebangsaan untuk menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air. Tindak lanjut konseling harus disesuaikan dengan ruang partisipasi yang ada pada masing-masing jenjang. Peserta didik SD bisa diajak mengajak teman yang merasa diabaikan untuk ikut

dalam kegiatan kelas. Peserta didik jenjang menengah bisa bertanggung jawab berdiskusi tentang pembagian peran/tanggung jawab dalam proyek ketika ada satu temannya yang menanggung beban lebih berat.

Menilai perkembangan lewat perilaku yang spesifik. Seorang peserta didik dapat memiliki kemungkinan selalu menyelesaikan tugas kelompok tepat waktu, tetapi kontrasnya, ia mengabaikan pendapat anggota lain. Hal ini menunjukkan perilaku yang spesifik. Ketepatan waktu menunjukkan karakter tanggung jawab terhadap tugas, sedangkan kesediaan mendengar menunjukkan bahwa kita menyadari keberadaan dan peran orang lain. Pengamatan guru dalam kegiatan di kelas dapat didukung dan dipadukan dengan refleksi dari peserta didik, sehingga guru dapat mengetahui apa yang menjadi alasan peserta didik dalam melakukan sesuatu dan bagaimana akibat yang ditimbulkan dari pilihannya. Dengan begitu, layanan konseling dan pembelajaran Pancasila saling melengkapi. Konseling memberi ruang bagi peserta didik untuk memahami dilema yang dihadapinya secara personal, pembelajaran Pancasila menyediakan konsep untuk menilai dilema itu, dan kehidupan sekolah memberi kesempatan untuk bertindak. Layanan konseling dalam hal ini lebih untuk mendorong munculnya karakter empati dan perilaku pro-sosial bagi peserta didik (Ardiana dkk., 2025; Iqbal & Syafriadi, 2025; Triaswari dkk., 2024).

Tantangan Implementasi dan Arah Pengembangan Konseling berbasis Nilai Pancasila

Kemampuan guru menerjemahkan nilai Pancasila menjadi tindakan. Hal ini menjadi tantangan yang paling besar. Frasyaigu dkk. (2024) selama mengadakan kegiatan pelatihan konseling terhadap para guru, menemukan bahwa mereka memiliki keterbatasan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya. Dalam sesi pelatihan konseling daring yang berfokus solusi, Ramli dkk. (2024) mencatat bahwa 77,4% peserta mendapat skor di bawah 70 pada evaluasi awal. Sementara itu, Asyah dkk. (2024) menemukan pemahaman peserta (guru) meningkat setelah pendampingan yang berisi materi diskusi dan simulasi. Temuan-temuan ini menunjukkan perlunya pengembangan profesional yang berlanjut sampai tahap penerapan. Guru perlu diberi kesempatan untuk mencoba pertanyaan yang dapat diajukan pada sesi konseling, menelaah caranya memberi respon terhadap pendapat peserta didik yang berbeda-beda, dan mendapat umpan balik atas tindak lanjut yang sudah disusun. Mengevaluasi praktik setelah pelatihan akan menunjukkan bagian mana yang sudah bisa diterapkan guru dan bagian mana yang masih butuh pendampingan.

Keberagaman budaya dan kesenjangan akses. Putri Abadi dkk. (2024) menekankan pentingnya memahami keberagaman latar sosial budaya peserta didik, karena hal tersebut akan menentukan pilihan pendekatan layanan konseling yang diperlukan. Meskipun Qondias dkk. (2025) dalam penelitiannya telah menawarkan penggunaan media interaktif untuk membahas keberagaman peserta didik di sekolah, namun di beberapa sekolah masih ditemui adanya

keterbatasan akses teknologi dan literasi digital menjadi hambatan dalam proses konseling (Maheswari & Fatayan, 2025). Peserta didik yang mengikuti layanan daring membutuhkan perangkat dan ruang yang cukup privat. Dengan memperhatikan hal ini, prinsip keadilan sosial sudah bisa diterapkan sejak sekolah menentukan cara peserta didik mendapat bantuan.

Kesinambungan antara layanan konseling, ruang kelas, dan keluarga. Pengembangan tanggung jawab peserta didik di beberapa sekolah masih terhambat oleh rendahnya kesadaran sebagian peserta didik dan terbatasnya dukungan keluarga di rumah (Harefa dkk., 2025). Sekolah merespon melalui komunikasi dengan orang tua, memanfaatkan layanan konseling, dan menerapkan pembelajaran yang mengajak peserta didik dapat mengungkapkan pengalamannya. Temuan ini melengkapi penelitian Iqbal & Syafriadi (2025) tentang peran pembiasaan sekolah dalam membentuk *civic disposition*. Dalam implementasinya, koordinasi dapat difokuskan pada satu perilaku spesifik. Ketika seorang peserta didik mengalami kesulitan untuk memenuhi tanggung jawab pada kelompoknya, guru dapat membantunya dalam mengenali penyebabnya melalui layanan konseling, guru mata pelajaran memberinya kesempatan mencoba kesepakatan baru, dan orang tua mendukung kebiasaan yang memungkinkan dilakukan di rumah.

Tantangan metodologis. Tantangan metodologisnya adalah mengetahui apakah perubahan perilaku tetap ada setelah kegiatan pendampingan selesai. Capaian dalam kajian ini beragam, mulai dari meningkatnya pemahaman guru dan kemampuan menyusun program, sampai perilaku peserta didik yang teramati dalam kegiatan sekolah. Untuk menilai penguatan *civic disposition*, perilaku yang sama bisa ditelusuri dalam beberapa kesempatan. Kesediaan mendengarkan pendapat yang berbeda, misalnya, dapat diamati saat bimbingan kelompok, saat peserta didik mengerjakan proyek kelas, dan saat ia menghadapi perselisihan tanpa arahan langsung dari guru. Refleksi peserta didik membantu menjelaskan alasan di balik tindakannya, sedangkan pengamatan berulang menunjukkan seberapa konsisten tindakan itu.

KESIMPULAN

Konseling berbasis nilai Pancasila adalah bantuan profesional yang membantu peserta didik memahami pengalamannya, memikirkan dampak tindakannya, dan memilih keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pancasila berperan ganda, yaitu sebagai tujuan layanan dan sebagai pedoman konselor dalam membangun relasi, sehingga peserta didik mengalami nilai itu langsung melalui perlakuan selama sesi konseling. Kelima sila tampak dalam proses konseling: sila pertama sebagai kerangka refleksi moral, sila kedua pada empati dan penolakan kekerasan, sila ketiga pada toleransi dan penerimaan perbedaan, serta sila keempat dan kelima pada musyawarah dan keadilan dalam konseling kelompok yang kolaboratif. Dengan bertolak dari pengalaman nyata peserta didik, memberi kesempatan praktik melalui proyek dan pembiasaan sekolah, serta menilai perkembangan lewat perilaku spesifik dan refleksi, konseling berbasis nilai Pancasila dapat menjadi strategi penguatan civic

disposition. Implementasinya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kemampuan guru menerjemahkan nilai menjadi tindakan, keberagaman budaya dan kesenjangan akses, lemahnya kesinambungan antara konseling, kelas, dan keluarga, serta sulitnya memastikan perubahan perilaku bertahan setelah pendampingan. Karena itu, pengembangannya perlu diarahkan pada pengembangan profesional guru yang berlanjut hingga tahap penerapan, layanan yang peka terhadap keberagaman, koordinasi antara guru dan orang tua, serta pengamatan perilaku yang dilakukan berulang.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiana, Syaimi, K. U., Nurlaili, & Utami, R. D. (2025). Peningkatan empati dan perilaku prososial siswa melalui layanan bimbingan kelompok berbasis nilai nilai Pancasila di kelas APL SMK N 3 Medan. *PEMA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat*, *5*(2), 510–517. https://doi.org/10.56832/pema.v5i2.1220

Asyah, N., Putri, R. F., & Putri, R. F. (2024). Pendampingan pelaksanaan penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) melalui layanan bimbingan dan konseling di SAS English Laboratory. *Altafani: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, *4*(1), 53–63. https://doi.org/10.59342/jpkm.v4i1.740

Banggo, T. F. W., Supeni, S., & Trisiana, A. (2025). Upaya penanggulangan kekerasan dalam menerapkan civic dispositions melalui Satuan Tugas Penanggulangan Kesiswaan pada siswa SMA Negeri Colomadu tahun 2025. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, *14*(2), 1–8. https://doi.org/10.33061/jgz.v14i2.13186

Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (Ed.). (2020). *Multicultural education: Issues and perspectives* (10 ed.). Wiley.

Cahyani, K., & Dewi, D. A. (2021). Peran guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk karakter peserta didik agar menciptakan siswa yang berkualitas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *9*(2), 268–281. https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34131

Cahyono, T. (2022). Implementasi layanan bimbingan dan konseling dalam penguatan profil pelajar Pancasila. *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, *5*(2), 125–134. https://doi.org/10.24235/prophetic.v5i2.12782

Corey, G. (2013). *Teori dan praktek konseling dan psikoterapi* (E. Koswara, Penerj.). Refika Aditama.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4 ed.). SAGE.

Damri, & Putra, F. E. (2020). *Pendidikan kewarganegaraan*. Kencana.

Frasyaigu, R., Ramadhani, D., Hidayat, M. T., Mulyahati, B., & Kenedi, A. K. (2024). Desain layanan bimbingan konseling dalam membudayakan nilai Profil Pelajar Pancasila siswa sekolah dasar. *Jurnal Abdidas*, *5*(5), 609–617. https://doi.org/10.31004/abdidas.v5i5.1018

Halawati, M., Pusparini, D., & Yana, M. (2025). Implementasi pembelajaran nilai-nilai Pancasila terhadap pembentukan karakter religius anak usia 5–6 tahun. *Al-Irsyad: Journal of Education Science*, *4*(2), 177–187. https://doi.org/10.58917/aijes.v4i2.239

Harefa, W. C., Lase, F., Harefa, A., & Hulu, S. K. (2025). Implementasi karakter bertanggungjawab siswa dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila. *JIIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *8*(10), 11389–11397. https://doi.org/10.54371/jiip.v8i10.9460

Iqbal, I., & Syafriadi, S. (2025). Integrasi Profil Pelajar Pancasila dalam pembelajaran PPKn untuk meningkatkan sikap moral siswa. *Paedagogie*, *20*(2), 373–382. https://doi.org/10.31603/paedagogie.v20i2.15426

Irwan. (2021). Revitalisasi civic disposition dalam menumbuhkan nilai-nilai Pancasila di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, *5*(2), 498–505. https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i2.702

Kunaefi, P. H., Nursaleh, A., & Hidayat, A. N. (2024). Program bimbingan berbasis nilai-nilai Pancasila dalam meningkatkan karakter prososial di SDN Simpang 1 Kabupaten Cianjur. *Jurnal Tahsinia*, *5*(3), 444–457. https://doi.org/10.57171/kdedh488

Maheswari, N. K., & Fatayan, A. (2025). Implementasi civic dispotition mata pelajaran Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan kecintaan tanah air pada peserta didik kelas 2 di sekolah dasar. *Jurnal Ilmiah Global Education*, *6*(3), 1281–1287. https://doi.org/10.55681/jige.v6i3.3954

Mazid, S., Wulansari, A., & Hasanah, I. (2025). Integrating civic spirituality and civic disposition to build ethical citizen character. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, *22*(1), 93–100. https://doi.org/10.21831/jc.v22i1.1286

Muttaqin, M. F., Damayanti, E., Latifah, U. H., Purwandi, N. A. S., Amini, Z. A., Damayanti, L. D. P., & Mahdania. (2025). *Pancasila sebagai landasan bimbingan dan konseling untuk pembentukan karakter*. Cahya Ghani Recovery.

Nasution, T., Hafizi, M. Z., & Siregar, H. (2024). Penguatan nilai-nilai luhur Pancasila dalam Al-Qur'an kepada peserta didik pada layanan bimbingan konseling. *ALACRITY: Journal of Education*, *4*(2), 79–89. https://doi.org/10.52121/alacrity.v4i2.307

Octavia, E., & Sumanto, I. (2018). Peran guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk karakter disiplin siswa di sekolah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *2*(2), 20–30. https://doi.org/10.31571/pkn.v2i2.955

Oktaviyasari, W. N., & Handoyo, E. (2026). Pengembangan dan validasi instrumen penilaian civic disposition pada materi menjadi warga negara yang baik. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *11*(3), 428–447. https://doi.org/10.23969/jp.v11i03.61258

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for

reporting systematic reviews. *BMJ*, *372*, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Putri Abadi, D., Hidayah, N., & Wahyuni, F. (2024). Pendekatan multikultural dalam layanan bimbingan konseling guna penguatan Profil Pelajar Pancasila dimensi berkebhinekaan global. *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, *8*(2), 867–879. https://doi.org/10.31316/gcouns.v8i2.5722

Qondias, D., Noge, M. D., Lodo, M. L., & Meo, V. (2025). Penguatan nilai-nilai multikultural melalui pembelajaran Pancasila berbasis media interaktif di sekolah dasar: Learning session on promoting multicultural values through the teaching of Pancasila education using interactive media in elementary schools. *Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, *5*(1), 35–47. https://doi.org/10.29303/darmadiksani.v5i1.6854

Ramli, M., Hidayah, N., Rahman, D. H., & Saputra, N. M. A. (2024). Pelatihan penerapan layanan konseling online berfokus solusi bermuatan nilai Pancasila pada guru BK. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, *5*(1), 21–29. https://doi.org/10.35870/jpni.v5i1.527

Ratts, M. J., Singh, A. A., Nassar-McMillan, S., Butler, S. K., & McCullough, J. R. (2016). Multicultural and social justice counseling competencies: Guidelines for the counseling profession. *Journal of Multicultural Counseling and Development*, *44*(1), 28–48. https://doi.org/10.1002/jmcd.12035

Riswanto, D. (2019). Penguatan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan kepada peserta didik pada layanan bimbingan dan konseling di sekolah. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, *3*(1), 13–19. https://doi.org/10.36412/ce.v3i1.903

Ritonga, N., & Saleh, S. (2024). Penerapan hidden curriculum untuk meningkatkan nilai-nilai toleransi dan kerjasama pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewaraganegaraan di sekolah menengah pertama. *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, *10*(1), 661–669. https://doi.org/10.29210/1202424414

Rozzaqyah, F., Yosef, Y., Putri, R. M., Ar, S., Rahmi, R., Alrefi, A., Maulana, A., & Ilhamsyah, F. (2024). Impementasi proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila pada layanan bimbingan dan konseling bagi guru BK di Prabumulih. *Suluah Bendang: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, *24*(1), 31–41. https://doi.org/10.24036/sb.05300

Setiawan, A., Sanusi, A. R., & Nugraha, Y. (2024). Peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai motivator dalam meningkatkan civic disposition bagi peserta didik kelas XI di SMA Negeri 1 Rawamerta. *Jurnal Kewarganegaraan*, *8*(1), 438–442. https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6223

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, *104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Triaswari, F. D., Sutrisno, & Asmaroini, A. P. (2024). Implementasi civic disposition peserta didik di Kurikulum Merdeka. *Academy of Education Journal*, *15*(1), 390–398. https://doi.org/10.47200/aoej.v15i1.2201

Umamah, F. N., & Nurchotimah, A. S. I. (2023). Peranan bimbingan konseling terhadap pembangunan karakter dalam merealisasikan nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Consulenza: Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi*, *6*(2), 286–294. https://doi.org/10.56013/jcbkp.v6i2.1474

Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, *39*(1), 93–112. https://doi.org/10.1177/0739456X17723971

Zalmi, P. O., & Montessori, M. (2022). Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan budaya sekolah dalam mengembangkan nilai civic disposition siswa di SMPN Kota Padang. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, *10*(1), 9–22. https://doi.org/10.21831/jppfa.v10i1.45549